

**PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LIPONSOS
KEPUTIH SURABAYA**

Laurensya Enjelita

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
laurensya05@gmail.com;

Djoko Widodo

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
papa.wiedya@gmail.com;

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Kota Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur dan memiliki jumlah penduduk terpadat, dengan padatnya jumlah penduduk yang ada di Kota Surabaya membuat masyarakat kurang mendapatkan perhatian sehingga menimbulkan masalah kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di Kota Surabaya salah satunya yaitu maraknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh sebab itu dengan hadirnya instansi pemerintah yaitu UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih untuk melakukan pemberdayaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat meningkatkan potensi. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan PMKS yang dilakukan oleh UPTD Liponsos Keputih Surabaya dan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pemberdayaan PMKS di UPTD Liponsos Keputih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Di UPTD Liponsos Keputih menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan dinilai belum maksimal karena dinilai dengan menggunakan 5 indikator menurut Suharto yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyongkongan, dan pemeliharaan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan belum berjalan maksimal karena terbatasnya pendamping yang membuat kurangnya pengawasan saat pelatihan, hasil karya yang dihasilkan belum maksimal meskipun sudah dipasarkan melalui E-Peken dan kurangnya pemenuhan dari segi papan untuk klien PMKS.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Peran*

A. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang mempunyai penduduk dengan jumlah terpadat setelah Jawa Barat, dan terus mengalami pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya. Sebaran penduduk yang ada relatif merata di Kabupaten dan Kota tetapi konsentrasi jumlah penduduk terbesar tetap di tempati oleh wilayah perkotaan yang menempati wilayah Jawa Timur. Salah satunya yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah Kota terbesar yang menjadi pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk Kota Surabaya menurut jenis kelamin pada Tahun 2022 sebesar 2.887.223 jiwa.

Tabel: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kota di Provinsi Jawa Timur

Kota Se Jawa Timur	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kota Pada Provinsi Jawa Timur (Jiwa)
	Laki-laki + Perempuan
	2022
Kota Kediri	289.418
Kota Blitar	151.960
Kota Malang	846.126
Kota Probolinggo	243.200
Kota Pasuruan	211.497
Kota Mojokerto	134.350
Kota Madiun	199.192
Kota Surabaya	2.887.223
Kota Batu	216.735
Jumlah	5.179.701

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2022*

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah penduduk terbanyak pada provinsi Jawa Timur dari 9 kota yang terdapat pada tahun 2022 ditempati oleh Kota Surabaya yaitu sebesar 2.887.223 jiwa dan kedua ditempati oleh Kota Malang sebesar 846.126 jiwa. Dengan padatnya jumlah penduduk yang ada di Kota Surabaya membuat masyarakat kurang mendapatkan perhatian sehingga menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial. Maraknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di Kota Surabaya.

PMKS atau biasa disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan individu atau keluarga yang mengalami disfungsi sosial karena adanya hambatan dan kesulitan yang terjadi sehingga mereka tidak dapat menjalin hubungan yang seimbang dengan lingkungan disekitarnya sehingga membuat

kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi dengan baik. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sendiri banyak ditemui keberadaannya di tempat umum seperti emperan toko, lampu merah, kolong jembatan, bahkan pinggiran rel kereta api. Para PMKS ini menjadikan tempat umum sebagai pemukiman dikarenakan tidak sanggup menyewa tempat tinggal atau untuk menekan biaya pengeluaran sehingga memanfaatkan lahan yang ada untuk dijadikan tempat tinggal sementara hal ini yang nantinya dapat mengganggu masyarakat dan dapat merusak keindahan dari Kota Surabaya.

Populasi PMKS yang ada di Kota Surabaya jika dibiarkan akan bertambah banyak dan dapat berdampak buruk untuk kawasan Kota Surabaya yaitu itu keberadaannya dapat mengganggu segala kegiatan masyarakat di jalan raya, tetapi jumlah PMKS tidak hanya didominasi oleh penduduk Kota Surabaya melainkan ada yang berasal dari penduduk luar Kota Surabaya. Selain itu ditambah jumlah PMKS tidak hanya sendiri mereka memiliki keluarga. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial termasuk orang dalam golongan miskin dengan rendahnya latar belakang pendidikan bahkan ada yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan dan harus bersaing dengan penduduk lainnya dalam mendapatkan pekerjaan sehingga mereka bertahan hidup dengan cara menjadi pengemis, pemulung, pengamen agar bisa mendapatkan penghasilan meskipun tidak seberapa, selain itu ada yang menjadi gelandangan akibat tidak mempunyai tempat tinggal yang memadai. Oleh sebab itu perlunya hal ini memperoleh perhatian khusus dari pemerintah agar populasinya tidak membludak dan para PMKS mendapatkan pembinaan.

Pada akhirnya Pemerintah Kota Surabaya menciptakan program untuk dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial dengan membangun Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Berdirinya Liponsos ditujukan untuk memberikan fasilitas pelayanan seperti tempat penampungan serta rehabilitasi, pembinaan dan pemberdayaan bagi PMKS (Liputan6, 2020).

Seperti yang kita ketahui adapun peran dari UPTD Liponsos Keputih Surabaya menangani berbagai jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mulai dari Pengemis, Pemulung, Pengamen, ODGJ/Psikotik, Gelandangan, Lansia dan Anak Jalanan maupun Anak Terlantar yang terjaring razia oleh Satpol PP, hal ini bertujuan untuk membersihkan Kota Surabaya dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan memberikan upaya penyadaran kepada mereka. Sebagaimana diketahui bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tidak mampu menjalani fungsi sosialnya sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya untuk itu PMKS harus mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga dapat kembali menjalani fungsi sosialnya secara wajar. Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial sendiri yang merupakan bagian dari warga Indonesia sehingga berhak untuk mendapatkan hak atas kebutuhan dasarnya karena pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah pembentukan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa:

"yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945).

Hadirnya Instansi Pemerintah seperti UPTD Liponsos selain menjadi tempat penampungan sementara atau tempat rehabilitasi bagi para PMKS juga menjadi tempat pemberdayaan sehingga para PMKS mendapatkan pembinaan, adanya pembinaan tidak hanya pemberian ketrampilan tetapi dapat membantu para PMKS dalam memperbaiki pola perilaku sehingga para PMKS menjadi lebih baik lagi dan nantinya dapat menjadi bekal saat kembali dalam masyarakat agar menjadi lebih berdaya dan mandiri. Pemberdayaan sendiri merupakan sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dari individu ataupun kelompok yang tidak berdaya atau lemah untuk menjadi lebih mandiri sehingga nantinya dapat ikut serta dalam setiap aktivitas sosial yang ada di masyarakat.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh UPTD Liponsos Keputih Surabaya terhadap para PMKS adalah salah satunya membuat kegiatan untuk mengisi keseharian mereka dan sekaligus menjadi terapi aktivitas bagi mereka, dengan kegiatan pelatihan ketrampilan utamanya kepada penghuni yang sudah dinyatakan mental dan fisiknya sehat, mereka diberikan pelatihan handycraft seperti pembuatan keset, menjahit, kalung peluit, membatik selanjutnya hasil karya kerajinan yang sudah dibuat oleh penghuni Liponsos Keputih akan dipasarkan melalui E-Peken (Pemerintah Kota Surabaya, 2022) dan untuk uang hasil penjualan akan kembali ke penghuni. Selain itu juga dilakukan pembinaan mental spritual dengan kegiatan keagamaan seperti mengaji, dan sholat selain itu ada pembinaan jasmani dengan kegiatan senam dan ada kegiatan berkebun maupun pemeliharaan taman. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan diri serta tanggung jawab sosial sehingga para PMKS mampu berdaya dan siap untuk dipulangkan.

Adapun proses penerimaan para PMKS di UPTD Liponsos Keputih Surabaya dari penertiban/razia ataupun penyerahan secara sukarela, selanjutnya akan di assesment untuk mengetahui alamat serta kegiatannya di Surabaya, jika berasal dari Luar Kota akan langsung dikembalikan ke daerah asalnya tetapi jika tidak memiliki rumah dan lupa dengan identitasnya akan di bina di Liponsos Keputih sama halnya dengan PMKS yang berasal dari Kota Surabaya sendiri. Selanjutnya terdapat proses pendataan yang dilaksanakan sebelum penghuni UPTD Liponsos menempati barak karena dari mereka kebanyakan tidak mempunyai identitas yang jelas kemudian dibutuhkan identifikasi untuk memastikan jenis PMKS-nya, dilakukan sidik jari, difoto untuk dimasukkan ke database, kemudian dimasukkan ke barak sesuai jenisnya.

Tabel: Populasi PMKS di UPTD Liponsos Keputih Surabaya

Kategori PMKS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pengemis	0	3	3
Pemulung	0	0	0
Pengamen	10	1	11

ODGJ/Psikotik	357	193	550
Gelandangan	46	23	69
Lansia	42	30	72
Anak Jalanan	0	0	0
Anak Terlantar	0	1	1
Total			706

Sumber: *UPTD Liponsos Keputih (Per Oktober 2022)*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan jumlah Populasi PMKS yang terdapat di UPTD Liponsos Keputih Surabaya sudah melebihi batas maksimal daya tampung, dimana batas daya tampung UPTD Liponsos keputih hanya 500 tetapi dari tabel diatas menunjukkan jumlah PMKS lebih dari 500, selain itu adanya keterbatasan jumlah pendamping atau tenaga di UPTD Liponsos Keputih yang tidak sebanding dengan jumlah banyaknya populasi PMKS dari berbagai jenis baik dari kota Surabaya maupun dari Luar kota Surabaya, Berdasarkan fenomena inilah peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Liponsos Keputih”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan

Menurut Suharto (2009) pemberdayaan mengacu pada kemampuan seseorang yang rentan atau lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk a) memenuhi kebutuhan utamanya, oleh karena itu mereka mempunyai kebebasan bukan hanya dalam hal menyuarakan pendapat mereka, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan, b) dalam memperoleh sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatannya dan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, menurut Suharto (2009) penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui:

1. Pemungkinan

Yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat mengembangkan potensi secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat atau para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut.

2. Penguatan

Yaitu memberikan penguatan terhadap pengetahuan serta kemampuan kepada masyarakat untuk dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu memupuk dan mengembangkan semua keterampilan dan kepercayaan diri yang mendukung kemandirian masyarakat.

3. Perlindungan

Yaitu melindungi masyarakat khususnya kelompok lemah agar tidak tertindas dari kelompok yang kuat, dan menghindari persaingan yang tidak seimbang (terutama tidak sehat) antara kelompok yang kuat dan yang lemah

dan untuk mencegah eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus ditujukan untuk penghapusan segala diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan.

4. Penyokongan

Yaitu memberikan dukungan maupun bantuan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tanggung jawabnya dalam kehidupan. Pemberdayaan harus mampu menyangga masyarakat agar tidak berakhir pada situasi dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan

Yaitu menjaga kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar kelompok yang ada di dalam masyarakat sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Pemberdayaan harus dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berusaha.

Peran

Istilah peran seringkali berkaitan dengan posisi seseorang, lebih jelasnya kata "peran" diambil dari istilah teater. Peran sendiri mempunyai arti bagian dari yang dimainkan dalam setiap keadaan, dari peran tersebut pelaku diharapkan supaya berperilaku sesuai dengan harapan orang dan lingkungannya.

Menurut Kozier Barbara dalam Margayaningsih (2018) mendefinisikan peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada keadaan sosial tertentu. Peran merupakan deskripsi sosial mengenai siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dihubungkan dengan orang lain, komunitas sosial maupun politik.

Menurut Soekanto (2012) peran merupakan sebuah aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status). Jika seseorang sudah melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Dalam peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti karena peneliti akan mengambil data penelitian berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak UPTD Liponsos Keputih.

Dalam penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.

Penelitian ini berfokus mengenai pemberdayaan PMKS yang dilakukan oleh UPTD Liponsos Keputih Surabaya. Dengan dianalisis menggunakan lima indikator dari Teori pemberdayaan masyarakat dari (Edi Suharto, 2009) yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyongkongan, dan pemeliharaan. Penelitian kali ini dilakukan di UPTD Liponsos Keputih selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada 3 informan yaitu Kepala UPTD, Ka Subag TU, dan kepada Koordinator ketrampilan di UPTD Liponsos. Lalu kegiatan lainnya yaitu observasi dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran UPTD Liponsos Keputih dalam melakukan pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh UPTD Liponsos Keputih Surabaya, peneliti menganalisis menggunakan 5 indikator dari Teori pemberdayaan menurut Suharto (2009):

Pemungkinan

UPTD Liponsos Keputih yang merupakan unit pelaksana teknis dinas yang dibawah oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dan berfungsi memberikan pelayanan dasar serta melakukan pemberdayaan dengan memberikan pelatihan maupun bimbingan kepada PMKS. UPTD Liponsos Keputih sudah melakukan pemberdayaan tetapi dinilai belum maksimal karena tidak semua klien PMKS yang sudah mengikuti pemberdayaan dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri dan dinilai belum berdaya. Adapun pemberdayaan yang sudah dilakukan di UPTD Liponsos dengan diberikan kegiatan pembinaan seperti handycraft, berkebun, pemeliharaan taman, pertukangan, budidaya lele, pembinaan jasmani setiap pagi tetapi karena terbatasnya pendamping atau tenaga di UPTD Liponsos Keputih yang membuat kurangnya pengawasan baik saat pelatihan ketrampilan maupun bimbingan mental spritual dimana jumlah PMKS yang ada di UPTD Liponsos Keputih tidak sebanding dengan pendamping yang ada dengan perbandingan satu banding dua puluh lima, adapun untuk hasil karya yang sudah dibuat oleh klien PMKS belum dapat dikatakan maksimal meskipun sudah dipasarkan selanjutnya banyak dari PMKS yang memang tidak dapat mengikuti berbagai kegiatan karena dari kondisi mental dan fisiknya belum sehat atau yang sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehingga harus menunggu arahan dari pendamping.

Penguatan

Dalam memberikan penguatan terhadap pengetahuan serta kemampuan kepada masyarakat khususnya kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sangat penting untuk dilakukan agar mereka dapat memenuhi segala kebutuhannya serta mampu untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada. Dalam hal ini UPTD melakukan assement atau pengkajian untuk mengasah kemampuan dari PMKS dan dari situ akan diketahui bakatnya sebelum masuk di UPTD Liponsos Keputih sehingga pihak UPTD berusaha memfasilitasi yang

memang bisa difasilitasi seperti handycraft sekarang hanya berjalan pembuatan keset, membatik, serta menjahit selanjutnya pelatihan berkebun para klien PMKS diajarkan untuk menanam dan merawat sayur sawi, kangkung, bayam, cabai. Selain itu juga terdapat pemeliharaan taman dengan diajarkan cara merawat taman, ada juga pertukangan membantu untuk pemasangan paving, ada budidaya lele dimana para klien PMKS memiliki tugas memberi makan lele. Selanjutnya pihak UPTD mendorong klien PMKS yang sudah dinyatakan sehat kondisi mental dan fisiknya untuk mengikuti kegiatan bimbingan mental spritual dan kegiatan pelatihan ketrampilan yang dapat melatih sel saraf memori yang ada di otak mereka selain itu akan terjadi interaksi antar klien PMKS sehingga membuat mereka tidak termenung, dan pihak UPTD Liponsos Keputih melibatkan klien PMKS yang sudah sehat kondisi mental dan fisiknya dalam kegiatan aktivitas di barak untuk membantu pendamping sehingga klien PMKS memiliki aktivitas yang produktif.

Perlindungan

Dalam memberikan perlindungan kepada klien PMKS pihak UPTD telah memenuhi kebutuhan sandang dan pangan tetapi untuk kebutuhan papan belum terpenuhi meskipun sudah adanya pengasramaan untuk laki-laki dan perempuan tetapi terkait tempat tidur yang ada disana belum dilengkapi dengan kasur sedangkan untuk fasilitas kegiatan pelatihan sudah tersedia. Selanjutnya perlindungan dari segi kesehatan fisik untuk klien PMKS pihak UPTD memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS. Bila klien PMKS mengalami masalah kesehatan akan diobatkan ke puskesmas tetapi jika tidak mawadai akan dirujuk kerumah sakit yang bekerja sama dengan UPTD Liponsos Keputih Surabaya sedangkan untuk kesehatan jiwa sudah bekerja sama dengan rumah sakit jiwa menur untuk ODGJ agar diketahui perkembangannya dan dilakukan pemeriksaan kesehatan setiap bulannya jadi untuk perlindungan kesehatan sudah terpenuhi semua mulai dari kesehatan jiwa, penyakit umum, dan yang sakit parah, Adapun untuk klien yang belum memiliki identitas akan dibuatkan KTP tetapi sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan biometrik kerja sama dengan dispenduk capil untuk memeriksa sidik jarinya memastikan sudah pernah terekam atau belum. Sedangkan untuk klien PMKS yang sudah dipulangkan tidak mendapatkan perlindungan tetapi tetap dilakukan pengawasan atau monitoring terkait dengan klien PMKS yang gangguan jiwa dengan konfirmasi ke kelurahan dan puskesmas dilakukan pemantauan disana.

Penyokongan

Pihak UPTD sudah berusaha memberikan dukungan penuh melalui pelatihan ketrampilan walaupun ada permasalahan mengenai SDM atau kurangnya pendamping dan kapasitas overload karena UPTD Liponsos merupakan penampungan terbesar dibanding dengan dilain tempat sehingga membuat hasil pemberdayaan belum maksimal tetapi klien PMKS tetap memiliki hasil karya. Dari permasalahan mengenai kurangnya SDM atau pendamping membuat pelaksanaan pemberdayaan kurang maksimal karena membuat pengawasan kepada klien kurang, selain itu banyaknya dari jumlah klien yang tidak semuanya dapat mengikuti pelatihan. Pihak UPTD juga mengusahakan hasil karya dari klien PMKS dipasarkan melalui E-Peken dan apabila ada tamu yang

berkunjung ke UPTD Liponsos. Adapun untuk hasil penjualan sendiri akan dikembalikan lagi kepada klien PMKS apabila jika memang tidak laku terjual maka akan kembali lagi diperkenalkan klien PMKS dan Pihak UPTD Liponsos tidak memiliki pembinaan khusus untuk para klien PMKS yang akan dipulangkan dan dari adanya dukungan penuh yang sudah diberikan oleh pihak UPTD Liponsos memang dapat membantu klien PMKS untuk mengembangkan potensi meskipun memang hasilnya belum maksimal.

Pemeliharaan

UPTD Liponsos Keputih telah berupaya dengan baik dalam hal pemeliharaan mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar klien PMKS dari sandang dan pangan, tetapi untuk kebutuhan papan masih terdapat kekurangan mengenai fasilitas tempat tidur yang belum dilengkapi dengan kasur meskipun sudah terdapat pengasramaan untuk laki-laki dan perempuan serta tersedia fasilitas kegiatan pelatihan. Selanjutnya dilihat dari segi sandang yaitu pakaian yang digunakan sehari-hari sudah tercukupi ditambah dengan adanya seragam pembinaan. Dilihat dari sisi pangan dengan diberikan makanan yang bergizi serta sudah konsultasikan ke ahli gizi dan makan 3 kali dalam sehari selain itu juga ada tambahan makanan seperti puding, kacang hijau dan buah, dari jaminan kesehatan juga sudah ada klien PMKS dibuahkan BPJS.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan PMKS di UPTD Liponsos Keputih Surabaya

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara ke UPTD Liponsos Keputih dapat diketahui bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan di UPTD Liponsos Keputih Surabaya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung dalam pemberdayaan PMKS di UPTD Liponsos Keputih Surabaya
 - a) Mendatangkan instruktur atau pelatih yang sudah ahli dibidangnya.
 - b) Memiliki ruangan untuk setiap kegiatan pembinaan meskipun tempat penampungan terbatas.
2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan PMKS di UPTD Liponsos Keputih Surabaya
 - a) Kurangnya pendamping atau tenaga yang tidak sebanding dengan populasi jumlah PMKS
 - b) Waktu kegiatan pembinaan yang terlaksana secara bersamaan.
 - c) Kondisi klien PMKS yang belum sehat mental dan fisiknya.

E. PENUTUP

Berikut adalah ringkasan dari hasil penelitian mengenai pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Liponsos Keputih Surabaya, maka kesimpulan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemungkinan

Sejauh ini pembinaan potensi yang diberikan UPTD Liponsos Keputih kepada PMKS belum dapat dikatakan maksimal meskipun sudah diberikan pelatihan ketrampilan karena terbatasnya pendamping yang membuat

kurangnya pengawasan saat pelatihan ketrampilan berlangsung serta hasil karya dari klien PMKS belum maksimal dan banyak dari Klien PMKS yang tidak dapat mengikuti berbagai kegiatan karena memang kondisi mental dan fisiknya belum sehat dan tidak semua klien PMKS yang sudah mengikuti pemberdayaan dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri

2. Penguatan

Dalam hal ini peran dari UPTD Liponsos Keputih dapat dikatakan sudah baik dengan adanya assessment atau dikaji akan diketahui bakat klien PMKS serta adanya pemberian pelatihan ketrampilan, bimbingan mental spritual dan dilibatkan untuk membantu petugas dalam aktivitas di barak sehingga dapat menjadi aktivitas keseharian dari PMKS sehingga menjadi lebih produktif.

3. Perlindungan

Perlindungan yang diberikan UPTD Liponsos Keputih terlihat sudah baik dengan dibuatkan identitas untuk klien PMKS berupa KTP, dan dibuatkan jaminan kesehatan BPJS, pemenuhan sandang dan pangan tetapi hanya saja dari pemenuhan papan dikatakan kurang meskipun sudah ada pengasramaan menurut jenis kelamin.

4. Penyongkongan

UPTD Liponsos Keputih sudah berusaha memberikan dukungan penuh terhadap klien PMKS yang diberdayakan sehingga mereka mampu mengembangkan potensi meskipun memang hasilnya belum maksimal tetapi pihak UPTD tetap mengusahakan hasil karya PMKS dipasarkan melalui E-Peken adapun untuk hasil penjualan akan dikembalikan kepada klien PMKS dan terkait pembinaan semuanya sama tidak ada pembinaan khusus sebelum PMKS dipulangkan.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan yang diberikan di UPTD Liponsos Keputih terlihat sudah baik mulai dari pakaian yang digunakan dalam sehari-hari dan makanan bergizi yang sesuai dengan standart pemenuhan gizi serta adanya tambahan makanan, dan jaminan kesehatan berupa BPJS meskipun adanya kekurangan mengenai fasilitas tempat tidur yang belum dilengkapi kasur dengan banyaknya jumlah PMKS.

6. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan PMKS di UPTD Liponsos Keputih Surabaya

Adapun faktor pendukung yang ditemukan yaitu mendatangkan instruktur atau pelatih yang sudah ahli dibidangnya, kedua memiliki ruangan untuk setiap kegiatan pembinaan.

Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam pemberdayaan di UPTD Liponsos Keputih surabaya adalah kurangnya pendamping atau tenaga yang tidak sebanding dengan populasi jumlah PMKS, kedua waktu kegiatan pembinaan yang terlaksana secara bersamaan, ketiga kondisi klien PMKS yang memang belum sehat mental dan fisiknya atau PMKS yang tidak bersemangat saat kegiatan pembinaan.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan saran, pertama yaitu melakukan penambahan pendamping atau tenaga di UPTD Liponsos Keputih dalam mengawasi kegiatan pembinaan

ketrampilan terhadap PMKS sehingga setiap klien PMKS dapat terus diawasi dan memberikan pendamping khusus untuk PMKS yang kondisinya belum stabil. Kedua melakukan pembenahan jadwal setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan di UPTD Liponsos Keputih agar setiap kegiatan pembinaan dapat terorganisir dan tidak bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kota di Provinsi Jawa Timur*.
<https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>
- Liputan6. (2020). *Bisa Jadi Inspirasi, Ini 5 Kegiatan Sosial ala Pemkot Surabaya*.
Liputan6.Com.
<https://www.liputan6.com/surabaya/read/4382691/bisa-jadi-inspirasi-ini-5-kegiatan-sosial-ala-pemkot-surabaya>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *PEMKOT SURABAYA LATIH ODGJ LIPONSOS BUAT HANDYCRAFT*. Pemerintah Kota Surabaya.
<https://www.surabaya.go.id/id/berita/69968/pemkot-surabaya-latih-odgj-liponsos-buat-handycraft>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (3rd ed.). PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.